
METODE EVALUATIF DALAM PROGRAM UPGRADING PERMUKIMAN KUMUH DI INDONESIA

¹Findara Illa Nursyifa, ²Ardhya Nareswari

^{1,2}Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Email: findaraillanursyifa@mail.ugm.ac.id¹

Informasi Naskah

Diterima: 08/08/2025; Disetujui terbit: 08/09/2025; Diterbitkan: 01/12/2025;

<http://journal.uib.ac.id/index.php/jad>

ABSTRAK

Berbagai program peningkatan kualitas permukiman kumuh di Indonesia, seperti KIP, P2KKP, dan KOTAKU, telah dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan infrastruktur dasar. Hasil pelaksanaan program-program tersebut menunjukkan keragaman, baik dari sisi capaian fisik maupun dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa studi mencatat bahwa perbaikan fisik tidak selalu diikuti oleh perubahan perilaku atau peningkatan kualitas hidup warga. Hal ini menunjukkan perlunya metode evaluasi yang tidak hanya menilai aspek fisik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tren dan metodologi evaluasi yang digunakan, serta memetakan metode evaluatif paling relevan berdasarkan konteks lokasi, jenis intervensi, dan waktu pelaksanaan program. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur sistematis terhadap 18 artikel ilmiah yang relevan, melalui proses penyaringan menggunakan metode PRISMA dan analisis visual bibliografik menggunakan VOSviewer. Artikel-artikel tersebut dianalisis berdasarkan metode evaluasi, prinsip dan kriteria yang digunakan, serta kesesuaian metode dengan konteks lokasi dan waktu pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat Metode evaluatif utama yang digunakan, yaitu: (1) *input-output* atau berbasis indikator fisik, (2) *outcome-based*, (3) partisipatif, dan (4) berbasis konteks lokal. Masing-masing metode memiliki fokus, kelebihan, dan keterbatasan tersendiri. Untuk menjawab kompleksitas permasalahan di permukiman kumuh, penggabungan metode fisik dan sosial dinilai lebih relevan, terutama pada wilayah yang memiliki karakter khusus. Metode evaluasi yang fleksibel dan kontekstual menjadi penting agar program *upgrading* dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Kata Kunci: evaluasi program, permukiman kumuh, *upgrading*, studi literatur, metode evaluatif

ABSTRACT

Various slum upgrading programs in Indonesia such as KIP, P2KKP, and KOTAKU have been implemented to improve environmental conditions and basic infrastructure. However, the outcomes of these programs show considerable variation, both in terms of physical achievements and their impact on community life. Several studies note that physical improvements are not always followed by behavioral changes or enhancements in residents' quality of life. This highlights the need for evaluation approaches that assess not only physical aspects but also consider social, economic, and institutional dimensions comprehensively. This study aims to examine various evaluation methods used in previous studies on slum upgrading programs in Indonesia. A systematic literature review was conducted on 18 relevant academic articles, using the PRISMA approach for filtering and bibliographic visualization analysis through VOSviewer. These articles were analyzed based on the evaluation approach used, underlying principles and criteria, and the appropriateness of each method in relation to the location and timing of program implementation. The findings indicate four main types of evaluative approaches: (1) *input-output* or physical indicator-based, (2) *outcome-based*, (3) participatory, and (4) context-based. Each approach has its own focus, strengths, and limitations. To address the complex challenges in slum settlements, combining physical and social evaluation approaches is considered more relevant, especially in areas with unique characteristics. Flexible and context-sensitive evaluation methods are essential to ensure that upgrading programs truly benefit communities in the long term.

Keyword: program evaluation, slum settlements, *upgrading*, literature review, evaluative approach

1. Pendahuluan

Perkembangan urbanisasi yang pesat di berbagai kota di Indonesia memunculkan tantangan dalam pengelolaan permukiman. Salah satu dampak dari proses urbanisasi ini adalah mendorongnya pertumbuhan permukiman informal yang berakibat pada meningkatnya jumlah kawasan permukiman kumuh, yang tidak hanya mencerminkan ketimpangan sosial ekonomi, tetapi juga memperburuk kualitas lingkungan. Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kondisi ini mendorong urgensi program *upgrading* permukiman kumuh sebagai bagian dari pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. UN-HABITAT mendefinisikan permukiman kumuh sebagai kawasan yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi kehidupan yang buruk (Florencetina & Aditantri, 2022). Permukiman semacam ini ditandai oleh karakteristik bangunan tidak atau semi permanen, pola hunian yang tidak teratur, tingkat kepadatan tinggi, keterbatasan prasarana seperti jalan dan drainase, serta ketiadaan sistem pengelolaan sampah, sehingga memunculkan citra lingkungan yang kumuh (Avelar et al., 2008 Florencetina & Aditantri, 2022).

Berbagai program peningkatan kualitas permukiman kumuh telah dijalankan oleh pemerintah, antara lain Kampung *Improvement* Program (KIP), Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP), dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program-program tersebut dirancang untuk mengurangi kawasan kumuh melalui perbaikan kondisi fisik lingkungan serta peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar (Huda et al., 2023). Sejalan dengan pelaksanaannya, sejumlah studi telah dilakukan untuk mengevaluasi capaian maupun tantangan implementasi program-program tersebut. Berdasarkan hasil studi terdahulu, ditemukan bahwa hasil pelaksanaan program *upgrading* menunjukkan keragaman, baik dari sisi capaian fisik maupun dari dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Beberapa penelitian mencatat bahwa perbaikan fisik belum selalu disertai perubahan signifikan dalam perilaku dan pola adaptasi warga. Studi di Yogyakarta dalam artikel "Evaluasi Program Penataan dan Rehabilitasi Permukiman Kumuh: Studi Kasus Kawasan Bantaran Sungai Code" menunjukkan bahwa infrastruktur hasil program rehabilitasi di bantaran Sungai Code banyak yang diabaikan disebabkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan (Rahayu et al., 2003). Selain itu, evaluasi implementasi NUSP-2 di Bandar Lampung mengungkap bahwa capaian fisik relatif lebih menonjol dibandingkan dampak sosial, sementara keberlanjutan program masih rendah karena aspek sosial-ekonomi warga belum cukup terintegrasi (Umam et al., 2022). Kemudian, kajian mengenai persepsi warga di Palembang menunjukkan bahwa meskipun kondisi lingkungan fisik buruk, penilaian masyarakat terhadap kenyamanan dan kualitas hidup sering kali berbeda dengan standar teknis, menandakan pentingnya pendekatan evaluasi yang berorientasi pada perspektif sosial dan kultural warga (Oktarini et al., 2022). Temuan serupa juga muncul dalam evaluasi KOTAKU di Semarang yang memperlihatkan bahwa fasilitas hasil pembangunan, seperti ruang terbuka hijau dan MCK, tidak selalu dimanfaatkan secara optimal oleh warga sehingga keberlanjutan pemanfaatannya masih menjadi tantangan (Moninggar & Septanaya, 2025). Kajian lain yang menyoroti perkembangan KIP di Surabaya pun menegaskan bahwa pendekatan fisik saja tidak cukup, dan keberhasilan program baru lebih nyata ketika disertai aspek pemberdayaan serta partisipasi masyarakat (Dianingrum, 2017).

Keragaman hasil dari pelaksanaan program *upgrading* permukiman kumuh menunjukkan perlunya metode evaluasi yang mampu memahami dinamika lokal serta mencakup berbagai dimensi atau aspek. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini menggunakan studi literatur sistematis guna menelusuri dan mengkaji beragam model evaluasi yang telah diterapkan dalam studi-studi sebelumnya terkait

program *upgrading* permukiman kumuh di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren evaluasi serta pola metode atau metodologi yang digunakan, dan merumuskan pemetaan metode evaluatif yang paling relevan dalam konteks lokasi, jenis intervensi, serta waktu pelaksanaan program yang beragam. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: (a) bagaimana metode evaluasi terhadap program *upgrading* permukiman kumuh berkembang dalam literatur akademik?; (b) apa saja tema utama dan prinsip serta kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi program tersebut?; (c) metode evaluasi seperti apa yang paling relevan diterapkan dalam konteks lokasi dan waktu pelaksanaan program yang berbeda-beda? Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual bagi literatur evaluasi program *upgrading* permukiman kumuh melalui sintesis komprehensif mengenai perkembangan metode evaluasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi perumusan kebijakan *upgrading* di masa mendatang, khususnya dalam pengembangan metode evaluatif program permukiman kumuh.

2. Kajian Pustaka Permukiman Kumuh

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992, permukiman diartikan sebagai kawasan di luar ekosistem yang berfungsi sebagai tempat tinggal serta untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Permukiman kumuh dalam UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 diartikan sebagai area permukiman yang tidak memenuhi standar kelayakan tempat tinggal akibat prasarana yang tidak sesuai, ketidakteraturan dalam konstruksi, serta kepadatan bangunan yang tinggi bersama dengan kualitas struktur dan fasilitas yang ada (Huda et al., 2023). Permukiman kumuh merupakan area kurang layak dengan keadaan lingkungan tempat tinggal yang mengalami penurunan kualitas di aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya (Sari & Ridlo, 2021). Umumnya, wilayah ini dihuni oleh warga yang mengalami kesulitan ekonomi, dengan jumlah penduduk yang melebihi kapasitas tempat tinggal yang ada, serta infrastruktur yang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh meliputi aspek sosial, fisik, ekonomi, dan budaya. Aspek fisik mencakup kepadatan bangunan serta infrastruktur seperti keadaan saluran drainase, sistem air limbah, sumber air bersih, jalan, dan pengelolaan sampah. Sementara itu, aspek ekonomi, sosial, dan budaya mencakup migrasi, penghasilan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, beban tanggungan, dan sistem keluarga besar (Fitri, 2021 dalam Huda et al., 2023).

Program *Upgrading* Permukiman Kumuh di Indonesia

Program *upgrading* permukiman kumuh di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Secara garis besar, terdapat tiga program *upgrading* yang pernah dan sedang diterapkan, yaitu: *Kampung Improvement Program* (KIP), Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP), dan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

a. *Kampung Improvement Program* (KIP)

Program peningkatan permukiman kumuh di Indonesia telah berlangsung sejak 1969, dimulai dengan *Kampung Improvement Program* (KIP). Tujuan utamanya adalah memperbaiki lingkungan kampung kota yang kumuh dan tidak sehat agar menjadi layak, sehat, dan nyaman. KIP fokus pada perbaikan fisik dan administrasi kawasan kumuh padat penduduk. Dalam lima tahun pertama, program ini mencakup 20% wilayah Jakarta, mencerminkan komitmen pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh (Huda et al., 2023).

b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)

Selanjutnya, pemerintah mengembangkan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) untuk menyelaraskan berbagai kebijakan penanganan kawasan kumuh dalam kerangka strategis nasional. P2KKP mendukung target RPJMN dan SDGs, khususnya target 11.1 tentang akses

terhadap perumahan layak dan terjangkau. Program ini menekankan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan integrasi kelembagaan. Namun, tantangan tetap ada, seperti ketimpangan kapasitas daerah, koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, dan lahan di kota padat (Huda et al., 2023).

c. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Pada 2016, pemerintah meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai kelanjutan P2KKP dalam skema NSUP (*National Slum Upgrading Program*) dengan dukungan Bank Dunia. KOTAKU menargetkan penurunan kawasan kumuh seluas 38.431 ha di 269 kabupaten/kota hingga 2022. Program ini mengedepankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mengintegrasikan intervensi fisik dan penataan kelembagaan. Penilaian kekumuhan mengacu pada tujuh indikator: kualitas dan kepadatan bangunan, jalan lingkungan, drainase, air minum, pengelolaan sampah, dan limbah (Huda et al., 2023).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis untuk mengkaji berbagai sumber terkait evaluasi program *upgrading* fisik permukiman kumuh di Indonesia. Studi literatur dilakukan dengan merangkum referensi seperti jurnal, buku, prosiding, dan dokumen lainnya secara terstruktur sesuai topik penelitian (Creswell, 2014 dalam Habsy, 2017). Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi tren tematik, variasi metode, serta prinsip evaluatif dari studi-studi sebelumnya.

Data diperoleh dari artikel akademik dan praktis yang relevan, menggunakan kata kunci seperti "*slum upgrading evaluation in Indonesia*", "evaluasi penanganan permukiman kumuh", dan "evaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh". Pencarian dilakukan melalui platform seperti *Google Scholar*, *Semantic Scholar*, *Open Knowledge Map*, dan *Web of Science*, tanpa pembatasan tahun publikasi. Seleksi artikel mengikuti tahapan PRISMA: identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi. Dari 26 artikel awal, terpilih 16 artikel yang relevan berdasarkan konteks Indonesia, pendekatan evaluatif, dan keterkaitan arsitektural. Artikel yang tidak sesuai dieksklusi karena berada di luar konteks atau tidak membahas evaluasi *pasca-upgrading*. Selain PRISMA, *bibliographic analysis* juga digunakan dengan VOSviewer untuk memetakan keterkaitan antar tema dan istilah dalam literatur, serta mengklasifikasikan pendekatan metodologis. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan mengkaji tujuan, lokasi studi, metode evaluasi, dan hasil utama tiap artikel. Temuan diklasifikasikan secara tematik untuk mengidentifikasi pola evaluasi, prinsip dominan, serta kekuatan dan keterbatasan masing-masing metode.

4. Hasil dan Pembahasan

Proses Penyaringan Literatur Menggunakan Metode PRISMA

Penelitian ini menerapkan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) sebagai kerangka kerja sistematis dalam proses seleksi literatur. Prosedur ini terdiri dari empat tahap utama, yaitu:

a. Identifikasi (*Identification*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian literatur melalui beberapa *platform* daring seperti *Google Scholar*, *Semantic Scholar*, *Open Knowledge Map*, dan *Web of Science*. Kata kunci yang digunakan antara lain: (1) "*slum upgrading evaluation in Indonesia*" (2) "evaluasi penanganan permukiman kumuh" (3) "evaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh". Hasil dari pencarian ini menghasilkan 26 artikel yang memiliki kesesuaian awal terhadap topik penelitian.

b. Penyaringan (*Screening*)

Artikel yang ditemukan kemudian disaring berdasarkan judul dan abstrak untuk menghilangkan duplikasi dan studi yang tidak relevan. Kriteria eksklusi meliputi: (1) Artikel yang hanya membahas pelaksanaan program tanpa menjelaskan cara

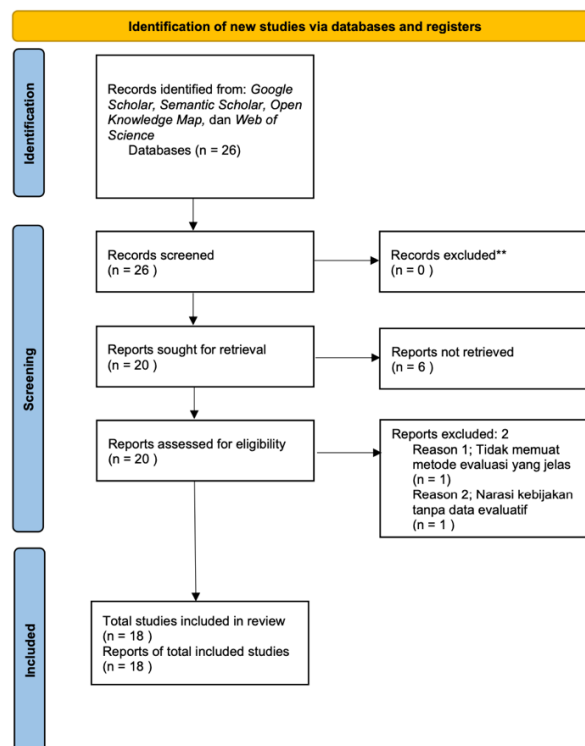
mengevaluasinya, seperti tidak menyebutkan metode, indikator, atau hasil evaluasi. (2) Artikel yang isinya lebih banyak membahas kebijakan secara umum atau bersifat deskriptif, misalnya hanya membahas rencana awal program atau konteks kebijakan tanpa melihat dampaknya di lapangan. Setelah tahap penyaringan awal ini, tersisa 20 artikel untuk ditelaah lebih lanjut.

c. Penilaian Kelayakan (*Eligibility*)

Pada tahap ini, isi setiap artikel dibaca dan ditelaah secara menyeluruh untuk memastikan bahwa isinya sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain: (1) Apakah artikel membahas evaluasi program *upgrading* permukiman secara jelas; (2) Apakah artikel menggunakan metode arsitektural, spasial, atau terkait pembangunan permukiman; (3) Apakah artikel menjelaskan tujuan evaluasi dan hasilnya secara terperinci. Setelah proses ini, 4 artikel tidak lolos sehingga total sebanyak 16 artikel digunakan dalam penelitian ini.

d. Inklusi (*Included*)

Setelah melalui proses penyaringan dan penilaian kelayakan, sebanyak 18 artikel dinyatakan layak dan digunakan sebagai sumber utama dalam studi ini. Berikut adalah diagram alur PRISMA yang digunakan dalam proses penyaringan artikel-artikel terkait.



Gambar 1. PRISMA 2020 Flow Diagram

Untuk memahami bagaimana metode evaluasi terhadap program *upgrading* permukiman kumuh berkembang dalam literatur akademik, dilakukan kajian terhadap 18 artikel yang dinyatakan layak dan digunakan sebagai sumber utama penelitian ini. Setiap artikel menggunakan metode evaluasi yang berbeda-beda, tergantung pada fokus penelitiannya, lokasi studi, serta waktu pelaksanaan program. Agar dapat dibandingkan secara sistematis, masing-masing artikel dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian setiap artikel.

Tabel 1. Hasil Studi Literatur dari 16 Artikel Terkait

No	Artikel Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Metode penelitian
1	Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Menangani Permukiman Kumuh di Kota Padang. (Yulia et al., 2024). Jurnal Niara. Vol 16 No. 3. 642-651.	Menganalisis efektivitas Program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Binuang.	Program dianggap kurang efektif karena beberapa indikator belum terpenuhi, seperti keteraturan bangunan, persampahan, dan proteksi kebakaran. Faktor penghambat: 1) tidak ada program untuk tiga indikator utama; 2) lambatnya pencairan dana.	Penelitian ini menggunakan 7 indikator kumuh sebagai parameter efektivitas. Konteks lokal dapat ditambahkan pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
2	Efektivitas Penanganan Luas Kawasan Kumuh pada Program Kotaku di Kota Jayapura. (Pabutungan et al., 2022). Jurnal ELIPS. Vol.5 No.3. 106-115.	Menganalisis efektivitas Program KOTAKU dalam mengurangi area permukiman kumuh di Kota Jayapura dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi.	Program berhasil mengurangi area kumuh secara signifikan pada tahun-tahun awal, namun area kumuh kembali meningkat pada tahun 2020. Faktor pendukung: sumber daya manusia, anggaran, dan perencanaan yang baik.	Penelitian ini menggunakan parameter nilai kekumuhan dari Program Kotaku melalui 7 indikator kumuh sebagai parameter efektivitas.
3	Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Batang Arau Kota Padang. (Risna et al., 2022). Jurnal Rekayasa. Vol.12 No.01. 59-71.	Menganalisis efektivitas program penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Batang Arau, Kota Padang.	Hasil program tidak efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, terlihat dari perubahan terbatas pada indikator kekumuhan. Dampak terhadap masyarakat cukup efektif, terlihat dari perubahan yang dirasakan pada beberapa aspek.	Penelitian ini menggunakan 7 indikator kumuh sebagai parameter efektivitas.
4	Efektivitas Program Kotaku di Kabupaten Sidoarjo. (Widodo et al., 2023). Jurnal Pubmedia.	Mendesripsikan dan menganalisis efektivitas Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengurangi luasan permukiman kumuh.	Program KOTAKU dinilai efektif dalam memenuhi delapan indikator efektivitas (kejelasan tujuan, strategi, kebijakan, perencanaan, penyusunan program, sarana, pelaksanaan, pengawasan).	Penelitian ini berfokus pada analisis <i>input</i> dan <i>output</i> program <i>Upgrading</i> kawasan kumuh.
5	Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Upaya <i>Upgrading</i> Permukiman Kumuh di Kota Pagar Alam. (Oktuwar et al., 2021). Jurnal Matra. Vol. 2. 1-10.	Mengukur tingkat efektivitas Program KOTAKU dalam mengentaskan permukiman kumuh di Kota Pagar Alam.	Program efektif di komponen kapasitas pemerintah dan masyarakat (90,9%) serta investasi infrastruktur (84,6%).	Penelitian ini menggunakan parameter nilai kekumuhan dari Program Kotaku melalui 7 indikator kumuh sebagai parameter efektivitas. Penelitian ini berfokus pada analisis <i>input</i> dan <i>output</i> program <i>Upgrading</i> kawasan kumuh.

6	Evaluasi Ruang Bantaran Sungai Pasca Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Selatan Kota Banjarmasin. (Difo M. Faridl et al., 2023). <i>EnviroScientee</i> , Vol. 19 No. 3, hlm. 35–48.	Mengevaluasi prinsip-prinsip perencanaan penataan permukiman kumuh bantaran sungai pasca implementasi Program KOTAKU.	Meskipun program berhasil dari sisi fisik, seperti pembangunan jalan dan IPAL, tetapi warga tidak terbiasa menggunakan fasilitas tersebut. Banyak yang kembali buang air di sungai, ruang sosial berkurang, dan kawasan kehilangan karakter alaminya.	Evaluasi dilakukan dengan metode indikator 7+1 kumuh (Permen PUPR No. 14/2018). Penelitian dilakukan dengan melihat konteks lokal sungai dan dampak nyata dari pembangunan bagi warga.
7	Evaluasi Strategi Penanganan Permukiman Kumuh dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan. (Marzuki et al., 2023). <i>Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah</i> , Vol. 11 No. 3, hlm. 780–790.	Mengevaluasi strategi penanganan permukiman kumuh, mengidentifikasi kondisi lingkungan, dan merumuskan ulang strategi yang tepat.	Luas kawasan kumuh memang berkurang, tapi status kekumuhan tetap "ringan". Capaian program paling rendah ada pada aspek jalan lingkungan. Sanitasi masih menjadi masalah besar di wilayah ini.	Penelitian menggunakan metode penilaian konteks lokasi penelitian yaitu kualitas lingkungan secara teknis melalui indeks pencemaran, indeks risiko sanitasi, dan analisis strategi menggunakan metode AHP.
8	Evaluasi Program Penataan dan Rehabilitasi Permukiman Kumuh: Studi Kasus Kawasan Bantaran Sungai Code, Yogyakarta. (Tri Rahayu et al., 2003). <i>Manusia dan Lingkungan</i> , Vol. X No. 2, hlm. 53–62.	Penelitian menggunakan metode penilaian kualitas lingkungan secara teknis melalui indeks pencemaran, indeks risiko sanitasi, dan analisis strategi menggunakan metode AHP.	Program berhasil pada penyediaan air bersih dan perbaikan jalan, namun pengelolaan sampah tidak berjalan baik dan tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada pengelolaan yang memadai setelah program selesai.	Penelitian menggunakan metode dampak sosial dengan mengeksplorasi pengalaman warga secara langsung melalui wawancara mendalam dan analisis kualitatif.
9	Analisis Penanganan Permukiman Ilegal di Bantaran Sungai: Studi Kasus Kali Pesanggrahan, Jakarta. (Reza Sasanto & Aip S. Khair, 2010). <i>Jurnal PLANESATM</i> , Vol. 1 No. 2, hlm. 146–148.	Untuk memahami kenapa warga masih tinggal dan kembali lagi ke permukiman ilegal di bantaran sungai, serta mengevaluasi peran kebijakan pemerintah.	Penelitian fokus menilai faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang menyebabkan warga tetap tinggal di lokasi ilegal, meskipun kawasan itu seharusnya tidak digunakan untuk permukiman.	Penelitian menggunakan metode kebijakan publik dan respons masyarakat melalui survei dan wawancara dengan warga serta instansi terkait.
10	Konservasi dan Revitalisasi Kawasan Bantaran Sungai Ciliwung di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. (Dianty et al., 2023).	Mendeskripsikan kondisi dan merumuskan strategi perancangan revitalisasi dan konservasi kawasan bantaran sungai	Evaluasi kondisi eksisting kawasan kumuh serta efektivitas rancangan konservasi dan revitalisasi berdasarkan konteks lokal, sosial, dan regulasi tata ruang	Penelitian ini berfokus pada evaluatif deskriptif berbasis kontekstual, dengan metode kualitatif dan kuantitatif melalui observasi lapangan, data sosial-ekonomi, regulasi sempadan sungai, serta partisipasi masyarakat dalam pemetaan masalah

	Jurnal Arsitektur dan Desain, Vol. 04 No. 02, 186–194.			dan potensi
11	Dampak Penataan Permukiman Kumuh terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kawasan Bagan Deli. (Manurung et al., 2019). Jurnal Inovasi, Vol. 16 No. 1, 1–10.	Mengevaluasi dampak penataan kawasan kumuh terhadap peningkatan kualitas hidup.	Evaluasi <i>ex-post</i> terhadap dampak penataan kawasan kumuh melalui indikator kualitas hidup (aksesibilitas, ekonomi, kesehatan, keamanan).	Penelitian ini berfokus pada evaluatif kuantitatif berbasis <i>outcome</i> ; analisis sebelum dan sesudah program dengan indikator kualitas lingkungan dan sosial-ekonomi.
12	Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Permukiman pada Program KOTAKU di Kelurahan Pancor Kabupaten Lombok Timur. (Ariana et al., 2023). Vol. 17 No. 2, 657–663.	Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana program KOTAKU.	Evaluasi pelaksanaan fisik infrastruktur dan perubahan perilaku masyarakat sebagai indikator keberhasilan.	Penelitian ini berfokus pada evaluatif kuantitatif berbasis perbandingan rencana realisasi serta perubahan perilaku masyarakat; berbasis literatur dan data pemerintah.
13	Konservasi dan Revitalisasi Kawasan Bantaran Sungai Ciliwung di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. (Dianty et al., 2023). Jurnal Arsitektur dan Desain, Vol. 04 No. 02, 186–194.	Mendeskripsikan kondisi dan merumuskan strategi perancangan revitalisasi dan konservasi kawasan bantaran sungai	Evaluasi kondisi eksisting kawasan kumuh serta efektivitas rancangan konservasi dan revitalisasi berdasarkan konteks lokal, sosial, dan regulasi tata ruang.	Penelitian ini berfokus pada evaluatif deskriptif berbasis kontekstual, dengan metode kualitatif dan kuantitatif melalui observasi lapangan, data sosial-ekonomi, regulasi sempadan sungai, serta partisipasi masyarakat dalam pemetaan masalah dan potensi.
14	Kualitas Ruang Terbuka Publik Menggunakan <i>Good Public Space Index</i> , Studi Kasus: <i>Community Centre</i> Pamulang. (Fasikhi et al., 2023). Jurnal Arsitektur dan Desain, Vol. 04 No. 02, 120–132.	Menilai kualitas ruang terbuka publik berdasarkan indikator GPSI	Penilaian kualitas ruang publik melalui indikator kuantitatif berbasis perilaku pengguna (intensitas, keberagaman, durasi, variasi aktivitas).	Penelitian ini berfokus pada evaluatif kuantitatif berbasis parameter GPSI, dengan data observasi, survei pengguna, dan analisis aktivitas untuk mengukur <i>outcome</i> pemanfaatan ruang publik terhadap kualitas sosial dan fungsional ruang.
15	Analisis Kepuasan Pengunjung terhadap Kualitas Infrastruktur Wisata Pantai Kampung Tua Nongsa. (Nursyamsu et al., 2023). Jurnal Arsitektur dan Desain, Vol. 04 No. 02, 179–185.	Mengetahui kepuasan pengunjung terhadap kondisi infrastruktur wisata di kawasan pantai Kampung Tua Nongsa.	Evaluasi tingkat kepuasan pengunjung terhadap fasilitas dan infrastruktur wisata berbasis persepsi pengguna dan keberlanjutan destinasi lokal.	Penelitian ini berfokus pada evaluatif kualitatif berbasis persepsi, menggunakan metode partisipatif (wawancara dan observasi langsung), serta menilai <i>outcome</i> dari kualitas infrastruktur terhadap pengalaman dan niat kunjungan ulang.

16	Evaluasi Rumah Susun Pekunden Berdasarkan Kaidah Layak Huni dan Berkelanjutan. (Kariza Dewi Wiryanti, Iwan Rudiarto, 2015). Jurnal RUANG, Vol. 1 No. 4, 2015, hlm. 241–250.	Mengevaluasi kelayakan hunian Rusun Pekunden berdasarkan prinsip hunian layak dan berkelanjutan.	Evaluasi hunian vertikal berdasarkan indikator fisik-lingkungan, sosial-ekonomi, dan <i>tenure security</i> .	Penelitian ini berfokus pada evaluatif kuantitatif berbasis parameter teknis, sosial, dan legalitas; menilai <i>outcome</i> jangka panjang terhadap kualitas hidup penghuni.
17	Evaluasi Implementasi Program <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2</i> (NUSP-2) di Kota Bandar Lampung. (Umam et al., 2022). Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Vol. 2 No. 2.	Mengukur keberhasilan program NUSP-2 berdasarkan aspek dampak (fisik dan non-fisik) serta keberlanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan).	Dampak fisik cukup tinggi (nilai 0,692), keberlanjutan kurang optimal (nilai 0,43). Dominasi dampak fisik menunjukkan keberhasilan parsial, tetapi keberlanjutan sosial dan ekonomi masih lemah.	<i>Mixing methodology</i> (gabungan kuantitatif dan kualitatif), dengan survei, wawancara, observasi, dan skoring pembobotan evaluasi dampak dan keberlanjutan.
18	Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Program Kotaku di Kel. Banggae, Kab. Majene). (Syamsiar et al., 2020). Urban and Regional Studies Journal, Vol. 2 No. 2.	Mengevaluasi kondisi permukiman pasca program Kotaku, serta perubahan, manfaat, dan dampak program terhadap lingkungan permukiman kumuh.	Permukiman masih kategori kumuh ringan–sedang. Perubahan infrastruktur terjadi, tetapi metode program tidak terintegrasi. Banyak indikator fisik dan sosial belum tertangani secara menyeluruh.	Penelitian deskriptif kualitatif dengan desain eksploratif, komparatif, dan evaluatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan lapangan (observasi & wawancara).

Sumber : (Hasil Analisis Penulis, 2025)

Setelah penyaringan artikel dengan metode PRISMA, analisis bibliografis melalui VOSviewer menunjukkan bahwa evaluasi program peningkatan kualitas permukiman kumuh telah berkembang dari fokus fisik menuju pendekatan yang lebih menyeluruh. Visualisasi tema memperlihatkan beberapa klaster yang saling terkait.

Klaster pertama menekankan evaluasi berbasis infrastruktur dasar dan capaian teknis. Klaster lain menyoroti peningkatan kualitas hidup dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan warga. Aspek partisipasi masyarakat, persepsi lingkungan, dan keterlibatan dalam pengelolaan kawasan membentuk klaster tersendiri, mengindikasikan pentingnya pendekatan partisipatif. Selain itu, muncul klaster yang membahas legalitas lahan, dinamika sosial, dan strategi pengembangan kawasan, yang mencerminkan evaluasi kontekstual dan berbasis spasial. Secara keseluruhan, literatur evaluasi permukiman kumuh di Indonesia telah bergeser dari penilaian *output* fisik menuju penilaian dampak, keterlibatan warga, dan kesesuaian konteks lokal. Evaluasi tidak hanya dilihat dari sisi *output* fisik, tetapi juga dari sisi sejauh mana program berdampak nyata pada kehidupan masyarakat, keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat, serta kesesuaian dengan konteks lokasi wilayah dilakukannya penelitian.



Sumber: (Hasil Analisis Penulis, 2025)

Kecenderungan Tematik Metode Evaluasi

Berdasarkan hasil telaah terhadap 18 artikel dari *mapping* data bibliografik, ditemukan bahwa metode evaluatif terhadap program *upgrading* permukiman kumuh di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat kecenderungan utama, yaitu: metode *input-output* indikator fisik, metode berbasis *outcome* atau dampak nyata program *upgrading* terhadap kehidupan masyarakat, metode partisipatif, dan metode kontekstual.

a. Metode Evaluasi *Input-Output* Berbasis Indikator Fisik

Sebagian besar artikel menggunakan metode ini, yang mengevaluasi keberhasilan program berdasarkan pencapaian fisik seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air bersih, atau pengurangan luas kawasan kumuh. Evaluasi didasarkan pada indikator fisik yang tercantum dalam regulasi nasional, seperti Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 tentang 7+1 indikator kumuh. Contoh studi yaitu (Yulia et al., 2024; Alam et al., 2021; Patubungan et al., 2022; Ariana & karyawan, 2023) menggunakan parameter kuantitatif berbasis infrastruktur.

b. Metode Evaluasi *Outcome-Oriented*

Metode ini menilai keberhasilan program melalui dampaknya terhadap masyarakat, seperti perubahan kualitas hidup, kepuasan masyarakat, persepsi terhadap lingkungan, dan keberfungsian infrastruktur. Evaluasi tidak hanya fokus pada hasil fisik, tetapi juga pada bagaimana manfaat program dirasakan oleh warga. Contoh studi yaitu (Manurung, 2019; Wiryanti & Rudiarto, 2015) menilai *outcome* dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hunian. Kemudian (Nursyamsu et al., 2023; Fasikhi et al., 2023) menilai hasil program dari kepuasan dan intensitas penggunaan ruang publik.

c. **Metode Evaluasi berdasarkan Partisipatif Masyarakat**

Beberapa artikel menerapkan evaluasi berbasis partisipasi masyarakat, baik dalam proses evaluasi maupun dalam menilai keberhasilan program berdasarkan persepsi dan keterlibatan warga. Metode ini memberi ruang bagi warga sebagai penerima manfaat untuk ikut aktif dalam pelaksanaan program *upgrading*. Contoh studi yaitu (Rahayu et al., 2003) mengevaluasi berdasarkan pengalaman dan respons warga pasca penataan bantaran sungai Code, dan (Dainty Grace Putry et al., 2023) melibatkan masyarakat dalam pemetaan masalah dan potensi sebagai dasar evaluasi spasial kawasan bantaran Ciliwung.

d. **Metode Evaluasi berdasarkan Konteks Wilayah Penelitian**

Metode ini menggabungkan penilaian dari aspek fisik, sosial, dan lingkungan, disesuaikan dengan kondisi khas dari lokasi penelitian. Studi yang memakai metode ini biasanya dilakukan di daerah yang memiliki karakter khusus, seperti kawasan bantaran sungai, tepi pantai, atau wilayah yang rawan terhadap masalah lingkungan. Contoh studi yaitu (Faridl et al., 2023; Marzuki et al., 2023)

mengaitkan keberhasilan program dengan kondisi ekologis lokal, fungsi sosial, serta kebiasaan warga dalam memanfaatkan fasilitas.

Berdasarkan kecenderungan tematik metode evaluasi yang telah didapatkan dari hasil penyaringan diatas dapat dilihat bahwa temuan dari proses menunjukkan adanya pergeseran fokus evaluasi program *upgrading* permukiman kumuh di Indonesia, dari semula berpusat pada capaian fisik (*input-output*) menuju pendekatan yang lebih menyeluruh, yaitu dampak pada kehidupan masyarakat (*outcome-based*) dan keterlibatan warga (partisipatif).” Untuk memahami bagaimana tiap metode mengevaluasi program *upgrading* permukiman kumuh, berikut ini disajikan tabel yang merangkum prinsip evaluasi dan indikator utama yang digunakan dalam masing-masing metode.

Tabel 2. Metode Evaluasi Berbagai Artikel Jurnal

No	Penulis	Metode Evaluasi	Prinsip Evaluasi	Kriteria Evaluasi
1	(Yulia et al., 2024)	Partisipasi Warga	Kolaborasi warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan	Keterlibatan masyarakat
2	(Patubungan et al., 2022)	<i>Input-Ouput</i>	Efektivitas program dalam mengubah kondisi fisik kawasan	Pengurangan luas kumuh, indikator infrastruktur
3	(Risna et al., 2022)	<i>Input-Ouput</i>	Perubahan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Akses air bersih, drainase, sanitasi
4	(Widodo & riyadh, 2022)	<i>Input-Ouput</i>	Pengelolaan objek intervensi	8 indikator efektivitas kelembagaan
5	(Alam et al., 2021)	<i>Input-Ouput</i>	Ketahanan hasil infrastruktur dan kapasitas lokal	Fungsi infrastruktur kawasan
6	(Faridl et al., 2023)	Kontekstual	Respons sosial terhadap ruang hasil intervensi	Perubahan perilaku, penggunaan ruang sosial
7	(Marzuki et al., 2023)	Kontekstual	Kualitas lingkungan teknis di kawasan pesisir	Indeks sanitasi, pencemaran, hasil AHP strategi
8	(Rahayu et al., 2003)	Kontekstual	Keberfungsian infrastruktur pasca program	Kebermanfaatan pengelolaan air bersih dengan kebiasaan warga, pengelolaan sampah
9	(Sasanto & Khair, 2010)	Kontekstual	Relasi sosial-lingkungan dan legalitas hunian	Persepsi warga, aksesibilitas, status tanah
10	(Dainty Grace Putry et al., 2023)	Partisipasif	Keterlibatan komunitas dalam desain berbasis konteks	Pemetaan sosial, regulasi ruang, observasi lapangan
11	(Manurung, 2019)	<i>Outcome-based</i>	Dampak ekonomi pasca penataan	Aksesibilitas, ekonomi keluarga, kesehatan
12	(Ariana, 2023)	Kontekstual	Perbandingan antara rencana dan capaian fisik	Realisasi infrastruktur, perubahan perilaku
13	(Fasikhi et al., 2023)	<i>Outcome-based</i>	Keberfungsian ruang publik terhadap aktivitas warga	GPSI: intensitas, variasi aktivitas, durasi pakai
14	(Nursyamsu et al., 2023)	<i>Outcome-based</i>	Kenyamanan dan pengalaman	Persepsi pengunjung, niat kunjungan ulang

No	Penulis	Metode Evaluasi	Prinsip Evaluasi	Kriteria Evaluasi
15	(Wiryanti & Rudiarto, 2015)	<i>Outcome-based</i>	pengguna ruang Kelayakan hunian secara fisik, sosial, dan hukum	Struktur bangunan, ekonomi penghuni, keamanan
16	(Taji, 2021)	<i>Input-Output</i>	Perubahan spasial permukiman	Visualiasi spasial, tren kekumuhan
17	(Umam et al., 2022)	<i>Outcome-based</i>	Evaluasi dampak dan keberlanjutan program	Skor dampak fisik, sosial dan lingkungan
18	(Syamsiar et al., 2020)	<i>Outcome-based</i>	Evaluasi perubahan kondisi Kawasan pasca program	Infrastruktur, sosial-budaya, persepsi warga

Sumber : (Hasil Analisis Penulis, 2025)

Untuk melihat pola yang lebih jelas, dilakukan tabulasi frekuensi munculnya prinsip dan kriteria evaluasi dalam seluruh artikel. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi elemen-elemen evaluasi apa saja yang paling sering dipertimbangkan, serta melihat kecenderungan penggunaan metode dalam konteks tertentu. Tabulasi ini juga membantu dalam merumuskan kesimpulan mengenai kesesuaian metode dengan lokasi serta tahapan waktu pelaksanaan program.

Tabel 3. Tabulasi Prinsip dan Kriteria yang Sering Muncul

Metode Evaluasi	Jumlah Artikel	Prinsip Evaluasi	Kriteria Evaluasi Paling Sering Digunakan
<i>Input-Output</i>	5 Artikel	- Efektivitas penurunan kekumuhan fisik - Pencapaian pembangunan infrastruktur - Kinerja kelembagaan	- 7 indikator kekumuhan (jalan, air, drainase, dan lain-lain) - Penurunan luas kawasan kumuh - Perbandingan rencana dan realisasi
<i>Outcome-Based</i>	6 Artikel	- Perubahan kualitas hidup masyarakat - Efektivitas fungsi ruang dan hunian - Dampak sosial-ekonomi pasca program	- Aksesibilitas dan kenyamanan - Aktivitas warga di ruang publik - Persepsi warga dan pengalaman pengguna
Partisipasi masyarakat	2 Artikel	- Keterlibatan warga - Kolaborasi dalam pelaksanaan program	- Keterlibatan warga sejak perencanaan - Pemetaan sosial dan partisipasi di lapangan
Kontekstual Wilayah	5 Artikel	- Keselarasan dengan kondisi lokal - Respons terhadap ruang hasil program - Evaluasi berbasis karakteristik wilayah	- Perilaku masyarakat terhadap ruang - Kondisi fasilitas lingkungan dan kebiasaan warga

Sumber : (Hasil Analisis Penulis, 2025)

Berdasarkan rekapitulasi di atas, dapat dilihat bahwa evaluasi program *upgrading* permukiman kumuh dilakukan dengan metode yang beragam, yang dapat bergantung pada fokus studi dan konteks lokasi. Setiap metode membawa prinsip evaluasi yang berbeda dengan kriteria evaluasi yang juga bervariasi. Dengan kata lain, evaluasi program *upgrading* permukiman kumuh tidak hanya

dilihat dari hasil fisik semata, tetapi juga dari sejauh mana program dapat diterima, dimanfaatkan, dan dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 4. Tabel Kesesuaian Metode Evaluasi Berdasarkan Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Metode Evaluasi	Waktu Pelaksanaan	Jenis Lokasi dalam Artikel
<i>Input-Output</i>	Saat program berlangsung atau segera setelahnya	Lokasi yang menekankan perbaikan fisik seperti jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi
<i>Outcome-Based</i>	Setelah program selesai (<i>post-intervensi</i>)	Lokasi yang mengalami perubahan fisik dan sosial, serta mulai memanfaatkan ruang publik
Partisipasi Masyarakat	Selama tahap perencanaan dan pelaksanaan	Permukiman berbasis komunitas
Konteks Lokal	Tahap awal dan selama pelaksanaan	Kawasan dengan karakter khusus seperti bantaran sungai, kawasan padat, atau tidak legal

Sumber : (Hasil Analisis Penulis, 2025)

Beragam metode evaluasi dalam studi-studi terkait program *upgrading* permukiman kumuh menunjukkan bahwa masing-masing metode memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan. Metode *input-output* cenderung kuat dalam mengukur capaian fisik secara terukur, namun seringkali belum mampu menggambarkan kualitas perubahan dari sisi sosial dan kultural. Sebaliknya, metode partisipatif dan kontekstual lebih peka terhadap dinamika lokal, tetapi membutuhkan waktu dan proses yang lebih intensif, serta sulit untuk diukur secara kuantitatif. Metode *outcome-based* juga memberikan gambaran yang lebih holistik tentang hasil program, terutama dalam jangka menengah dan panjang, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada ketersediaan data pembandingan sebelum dan sesudah program. Sementara itu, keberlanjutan menekankan pentingnya pengelolaan pasca-program, namun sulit diukur jika tidak didukung oleh sistem pemantauan jangka panjang yang konsisten.

Analisis menunjukkan bahwa meskipun indikator fisik sering digunakan, pendekatan berbasis *outcome* dan partisipasi masyarakat cenderung memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai keberhasilan program, terutama pada konteks kawasan padat dan bantaran sungai. Pemetaan hasil evaluasi juga mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari terbangunnya infrastruktur, tetapi dari seberapa besar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dan keberlanjutan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, untuk memahami keberhasilan program *upgrading* secara menyeluruh, penggabungan dua atau lebih metode evaluasi menjadi pilihan yang lebih ideal. Misalnya, metode *input-output* dapat dikombinasikan dengan metode partisipatif untuk menilai capaian fisik sekaligus memastikan bahwa proses pembangunan berjalan inklusif dan sesuai kebutuhan warga. Begitu pula, metode *outcome-based* dapat diperkuat dengan perspektif kontekstual agar hasil yang diperoleh lebih sesuai dengan kondisi spesifik permukiman, terutama di wilayah padat, sempadan sungai, atau kawasan informal. Berikut adalah ringkasan kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing metode evaluasi:

Tabel 5. Kelebihan dan Keterbatasan Metode Evaluasi

Metode Evaluasi	Kelebihan Metode	Keterbatasan Metode
<i>Input-Output</i>	Ukur capaian fisik secara jelas dan terukur	Tidak menilai dampak jangka panjang atau penerimaan warga
<i>Outcome-based</i>	Tampilkan perubahan nyata pasca intervensi	Butuh data pembandingan sebelum-sesudah; bisa bias tanpa kontrol
Partisipatif	Libatkan warga secara aktif, hasil lebih sesuai kebutuhan lokal	Butuh waktu dan proses panjang; sulit diukur kuantitatif

Konteks Lokal	Sesuai karakter budaya, sosial, dan ruang kawasan	Interpretatif; hasil tidak selalu bisa digeneralisasi
---------------	---	---

Sumber : (Hasil Analisis Penulis, 2025)

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing metode, strategi evaluasi yang menggabungkan pendekatan fisik, sosial, dan lokal secara bersamaan dinilai lebih relevan, terutama pada kawasan yang memiliki dinamika kompleks dan tantangan yang beragam. Penggunaan metode gabungan ini tidak hanya meningkatkan ketepatan hasil evaluasi, tetapi juga mendorong perbaikan program yang lebih berkelanjutan dan berorientasi kepada masyarakat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dari telaah terhadap 18 artikel, ditemukan empat kecenderungan utama metode evaluasi, yaitu *input-output* berbasis indikator fisik, *outcome-based* yang menilai dampak sosial dan ekonomi, partisipatif yang melibatkan masyarakat, serta kontekstual yang menyesuaikan dengan karakteristik lokal. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran fokus evaluasi, dari dominan menekankan capaian fisik menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan dinamika sosial lingkungan.

Secara lebih spesifik, metode *input-output* relevan digunakan pada tahap pelaksanaan atau segera setelah program, terutama di lokasi yang membutuhkan perbaikan infrastruktur dasar seperti drainase, sanitasi, dan akses air bersih. Metode *outcome-based* lebih tepat diterapkan pada tahap pasca-program untuk mengukur dampak terhadap kualitas hidup, kepuasan, dan keberfungsian ruang publik. Metode partisipatif efektif pada tahap perencanaan dan pelaksanaan di kawasan berbasis komunitas karena memastikan bahwa intervensi sesuai dengan kebutuhan warga. Sementara itu, metode berbasis konteks lokal bermanfaat untuk kawasan dengan karakteristik khusus seperti bantaran sungai atau permukiman padat, di mana evaluasi harus memperhatikan kebiasaan warga serta kondisi ekologis.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengayaan literatur dengan menunjukkan bahwa relevansi suatu metode evaluasi penting ditentukan oleh kesesuaian dengan waktu pelaksanaan, jenis intervensi, dan karakteristik lokasi. Selain itu, pendekatan kombinasi dapat dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan evaluasi program pada masa mendatang untuk menangkap kompleksitas kondisi di lapangan. Sebagai ilustrasi, metode *input-output* dapat dipadukan dengan partisipatif untuk menilai capaian fisik sekaligus memastikan keterlibatan masyarakat, sedangkan metode *outcome-based* dapat dikombinasikan dengan kontekstual agar hasil evaluasi lebih sesuai dengan dinamika lokal. Meskipun demikian, kajian ini memiliki keterbatasan karena berbasis pada analisis literatur dan belum menguji efektivitas metode secara empiris di lapangan. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan studi komparatif dengan pendekatan campuran (*mixed-method*) di berbagai konteks permukiman guna menguji efektivitas kombinasi metode secara lebih mendalam. Selain itu, pengembangan instrumen evaluasi terpadu yang mencakup capaian fisik, keberlanjutan sosial, dan kesesuaian ekologis juga penting untuk memastikan program *upgrading* dapat dinilai secara lebih menyeluruh dan berorientasi pada keberlanjutan.

Daftar Pustaka

- Alam, P., Selatan, S., Oktuwar, D., Nurkukuh, D. K., & Priyoga, I. (2021). *Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Sebagai Upaya Pengentasan Permukiman Kumuh*. 2(283), 1–10.
- Ariana, N., & Karyawan, I. D. M. A. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Permukiman Pada Program Kotaku Di Kelurahan Pancor Kabupaten Lombok Timur. *Ganec Swara*, 17(2), 657. <https://doi.org/10.35327/Gara.V17i2.470>
- Dainty Grace Putry, Eni, S. P., Wijaya, E. S., & Jura, C. A. B. (2023). Konservasi Dan

- Revitalisasi Kawasan Bantaran Sungai Ciliwung Di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. *Journal Of Architectural Design And Development*, 4(2), 186–201. <https://doi.org/10.37253/Jad.V4i2.8602>
- Dianingrum, A. (2017). Perkembangan Program Perbaikan Kampung Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Surabaya. In *Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember*. <https://core.ac.uk/download/pdf/291463663.pdf>
- Faridl, D. M., Hadinata, I. Y., Mentayani, I., & Mahyudin, I. (2023). Evaluasi Ruang Bantaran Sungai Pasca Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelayan Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. *Enviroscienteae*, 19(3), 35. <https://doi.org/10.20527/Es.V19i3.17259>
- Fasikhi, F., Eni, S. P., & Sudarwani, M. M. (2023). Kualitas Ruang Terbuka Publik Menggunakan Good Public Space Index, Studi Kasus: Community Centre Pamulang. *Journal Of Architectural Design And Development*, 4(2), 120–132. <https://doi.org/10.37253/Jad.V4i2.8578>
- Florentetina, F., & Aditantri, R. (2022). Efektivitas Program Kampung Deret Berdasarkan Indikator Kotaku. *Vitruvian : Jurnal Arsitektur, Bangunan Dan Lingkungan*, 12(1), 13. <https://doi.org/10.22441/Vitruvian.2022.V12i1.002>
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1, 90–100. <https://doi.org/10.31100/Jurkam.V1i2.56>
- Huda Ahmad Sabili, Nuzullani Isma, Maulidah Siti Alvina, Kusuma Riyan Wijaya, & Kurniawan Irvan Arif. (2023). Kronologis Kebijakan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Indonesia Dari Tahun 1969-2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 115–128. <https://doi.org/10.31004/Jptam.V7i1.5270>
- Manurung, H. (2019). Dampak Penataan Permukiman Kumuh Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Di Kawasan Bagan Deli Belawan (The Impacts Of Slum Structuring On The Increase In People'S Quality Of Life At Bagan Deli, Belawan). *Inovasi*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.33626/Inovasi.V16i1.128>
- Marzuki, M., Setianto, Y. A., & Sodikin, S. (2023). Evaluasi Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 11(3), 780–790. <https://doi.org/10.26418/Jtlb.V11i3.69449>
- Moninggar, S. T., & Septanaya, I. D. M. F. (2025). Evaluating The Impact Of Infrastructure Interventions On Quality Of Life: A Case Study Of The City Without Poorer Areas Program (KOTAKU) In Surakarta, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth And Environmental Science*, 1498(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1498/1/012012>
- Nursyamsu, L., Gunawan, G. N. A., Pinassang, J. L., Khairi, M. Z., Artanti, N. K., Caroline, J., & Oliver, A. J. (2023). Analisis Kepuasan Pengunjung Terhadap Kualitas Infrastruktur Wisata Pantai Kampung Tua Nongsa. *Journal Of Architectural Design And Development*, 4(2), 179–185. <https://doi.org/10.37253/Jad.V4i2.8586>
- Oktarini, M. F., Lusetyowati, T., & Primadella, P. (2022). Persepsi Pemukim Terhadap Kualitas Lingkungan Di Permukiman Kumuh Tepian Sungai Musi, Palembang. *Jurnal Permukiman*, 17(2), 85. <https://doi.org/10.31815/Jp.2022.17.85-92>
- Patubungan, Y. L., Rante, H., & Julison, B. (2022). Efektivitas Penanganan Luas Kawasan Kumuh Pada Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Jayapura. *Jurnal ELIPS (Ekonomi, Lingkungan, Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Dan Sosial Budaya)*, 5(2), 106–115. <https://doi.org/10.31957/Jurnalelips.V5i3.2405>
- Rahayu, T., Sudaryono, & Baiquni, M. (2003). Evaluasi Program Penataan Dan Rehabilitasi Permukiman Kumuh Studi Kasus Kawasan Bantaran Sungai Code Bagian Utara Yogyakarta. *Manusia Dan Lingkungan*, 10(2), 53–62. <http://jpe-ces.ugm.ac.id/Ojs/Index.php/JML/Article/View/334/262>
- Risna, L., Noer, M., & Aziz, R. (2022). Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Batang Arau Kota Padang. *Jurnal Rekayasa*, 12(1), 59–71. <https://doi.org/10.37037/Jrftsp.V12i1.150>
- Sari Agistya Risna, & Ridlo Mohammad Agung. (2021). Studi Literature : Identifikasi Faktor

- Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160–176. <https://doi.org/10.30659/Jkr.V1i2.20022>
- Sasanto, R., & Khair, A. S. (2010). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Permukiman Ilegal Di Bantaran Sungai Studi Kasus: Bantaran Kali Pesanggrahan Kampung Baru, Kedoya Utara Kebon Jeruk. *Jurnal Planesa*, 1(2), 146–152.
- Syamsiar, N. R., Surya, B., & Tato, S. (2020). Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Pada Penanganan Program Kotaku Kelurahan Banggae Kabupaten Majene). *Urban And Regional Studies Journal (URSJ)*, 2(2), 54–65. <https://journal.unibos.ac.id/ursj/article/view/324>
- Taji, A. B. (2021). Identifikasi Spasial Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Syntax Idea*, 3(9), 2038–2048. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i9.1459>
- Umam, F. N., Pontoh, N. K., & Ermawati, M. (2022). Evaluasi Implementasi Program Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase 2 (Nusp-2) Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur). *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan*, 2(2), 103. <https://doi.org/10.35472/jppk.v2i2.619>
- Widodo, A., & Riyadh SH M, A. U. B. (2022). *Efektivitas Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kabupaten Sidoarjo*. 2, 1–18.
- Wiryanti, K. D., & Rudiarto, I. (2015). Evaluasi Rumah Susun Pekunden Berdasarkan Kaidah Layak Huni Dan Berkelanjutan. *Ruang*, 1(4), 231. <https://doi.org/10.14710/ruang.1.4.231-240>
- Yulia Fitri, Istijono Bambang, & Hidayat Benny. (2024). Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Menangani Permukiman Kumuh Di Kota Padang. *Jurnal Niara*, 16(3), 624–651. <https://doi.org/10.31849/Niara.V16i3.18758>